



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA
DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 20

SALINAN
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 40 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**PERUBAHAN KETENTUAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
PASURUAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN
PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Ketentuan Bab V huruf A angka 34 dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 diubah, sehingga angka 34 berbunyi sebagai berikut :

34. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kegiatan untuk menghadiri seminar, workshop, sosialisasi, desiminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi dan atau kegiatan lain yang sejenis.

Biaya perjalanan dinas dimaksud meliputi :

- Uang harian (*lump sum*);
- Uang representasi (*lump sum*);
- Transport PP (*at cost*) :
 - ✓ Dari tempat kedudukan (Kota Pasuruan) ke bandara / pelabuhan / stasiun / terminal pemberangkatan atau langsung ke tempat tujuan.
 - ✓ Dari bandara / pelabuhan / stasiun / terminal pemberangkatan ke bandara / pelabuhan / stasiun / terminal tujuan sesuai harga tiket (*dibuktikan dengan tiket*).
 - ✓ Dari bandara / pelabuhan / stasiun / terminal tujuan ke tempat tujuan (*hotel/penginapan/kantor*).
- Uang penginapan (*at cost*) sesuai tarif yang berlaku dan dibuktikan dengan bill hotel/penginapan.

Yang dimaksud *at cost* adalah biaya nyata yang harus dibayar untuk transport PP dan penginapan.

Perjalanan Dinas tersebut harus dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. Bentuk Format SPPD dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2010. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Dalam rangka efisiensi penandatanganan, dihimbau untuk menggunakan kertas NCR.

34.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi :

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tata cara pemberian uang harian perjalanan dinas dalam negeri (*Luar kota dalam propinsi Jawa Timur dan Luar propinsi Jawa Timur*) adalah :

- Untuk perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya, maka uang harian diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- Untuk perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar kantor penyelenggara (*hotel/tempat lain*) dan melewati batas kota, maka uang harian diberikan :
 - ✓ 1 (satu) hari pada saat kedatangan.
 - ✓ 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
 - ✓ Uang Saku selama kegiatan (lebih dari 2 hari) diluar saat kedatangan dan kepulangan sebesar uang harian dikurangi Rp. 100.000,-
 - ✓ Dan apabila kegiatan diselenggarakan hanya 1 (satu) hari, maka uang harian diberikan 1 (satu) hari.
- Khusus untuk pengemudi yang hanya mengantar/menjemput Walikota, Wakil Walikota, DPRD, Pejabat Eselon II dan III yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke atau dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pemberangkatan, maka pengemudi yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar/menjemput. Adapun Pejabat yang tanda tangan pada kolom kedatangan dan keberangkatan di SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut :

a. Dalam Kota :

(dalam rupiah)

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD | 50.000,- | /OH |
|----------------------------------|----------|-----|

b. Luar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 410.000,- | 250.000,- |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 410.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 410.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 410.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 410.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 400.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 375.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>PNS dan Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

c. Propinsi Papua :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|--|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 580.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 580.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 580.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 580.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 580.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 550.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 500.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 450.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 400.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 350.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 300.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 200.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>PNS dan Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

d. Propinsi DKI Jakarta :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 530.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 530.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 530.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 530.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 530.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 500.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 475.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 425.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 400.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 375.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 300.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 250.000,- | - |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |
|--------------------------------|-----------|---|

e. Propinsi Papua Barat dan Bali :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 480.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 480.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 480.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 480.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 480.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 450.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 425.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 400.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 350.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 300.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 225.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

f. Propinsi Nusa Tenggara Barat :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 440.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 440.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 440.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 440.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 440.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 400.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 375.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

g. Propinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara:

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|----------------------------------|-------------|-------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 430.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 430.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 430.000,- | 250.000,- |

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| - Pejabat Eselon II/a | 430.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 430.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 400.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 375.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

h. Propinsi DI Jogjakarta :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 420.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 420.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 420.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 420.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 420.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 400.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 375.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

i. Propinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Barat :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 410.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 410.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 410.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 410.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 410.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 400.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 375.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 325.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

j. Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 380.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 380.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 380.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 380.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 380.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 325.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 300.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 225.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

k. Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 370.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 370.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 370.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 370.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | 370.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 325.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 300.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 225.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

l. Propinsi Aceh dan Kalimantan Tengah :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Uang Harian | Uang Representasi |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | 360.000,- | 250.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | 360.000,- | 250.000,- |
| - Anggota DPRD | 360.000,- | 250.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | 360.000,- | 150.000,- |

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| - Pejabat Eselon II/b | 360.000,- | 150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | 350.000,- | - |
| - Pejabat Eselon III/b | 325.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/a | 300.000,- | - |
| - Pejabat Eselon IV/b | 275.000,- | - |
| - PNS Gol. IV | 250.000,- | - |
| - PNS Gol. III | 225.000,- | - |
| - PNS Gol. II | 200.000,- | - |
| - PNS Gol. I | 175.000,- | - |
| - Pengemudi (<i>Non PNS</i>) | 150.000,- | - |

34.2. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

Biaya transport perjalanan dinas adalah biaya untuk kebutuhan transportasi mulai dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan.

a. Dalam Propinsi Jawa Timur :

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Transport PP |
|----------------------------------|------------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | BBM Sesuai Jarak |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | BBM Sesuai Jarak |
| - Anggota DPRD | BBM Sesuai Jarak |
| - Pejabat Eselon II/a | BBM Sesuai Jarak |
| - Pejabat Eselon II/b | BBM Sesuai Jarak |
| - Pejabat Eselon III/a | BBM Sesuai Jarak |
| - Pejabat Eselon III/b | BBM Sesuai Jarak |
| - Pejabat Eselon IV/a | Sesuai Tiket |
| - Pejabat Eselon IV/b | Sesuai Tiket |
| - PNS Gol. IV | Sesuai Tiket |
| - PNS Gol. III | Sesuai Tiket |
| - PNS Gol. II | Sesuai Tiket |
| - PNS Gol. I | Sesuai Tiket |

b. Luar Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

| Propinsi | Transport Dari bandara/pelabuhan/s tasiun/ terminal pemberangkatan ke bandara/pelabuhan/s tasiun/ terminal tujuan (PP) | Transport dari bandara/pelabuhan / stasiun/ terminal tujuan ke tempat tujuan (PP) |
|---------------------|--|---|
| 1. Aceh | Sesuai Harga Tiket | 246.000,- |
| 2. Sumatera Utara | Sesuai Harga Tiket | 464.000,- |
| 3. Riau | Sesuai Harga Tiket | 140.000,- |
| 4. Kepulauan Riau | Sesuai Harga Tiket | 210.000,- |
| 5. Jambi | Sesuai Harga Tiket | 256.000,- |
| 6. Sumatera Barat | Sesuai Harga Tiket | 384.000,- |
| 7. Sumatera Selatan | Sesuai Harga Tiket | 248.000,- |
| 8. Lampung | Sesuai Harga Tiket | 296.000,- |
| 9. Bengkulu | Sesuai Harga Tiket | 184.000,- |
| 10. Bangka Belitung | Sesuai Harga Tiket | 172.000,- |

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| 11. Banten | Sesuai Harga Tiket | 640.000,- |
| 12. Jawa Barat | Sesuai Harga Tiket | 236.000,- |
| 13. DKI Jakarta | Sesuai Harga Tiket | 340.000,- |
| 14. Jawa Tengah | Sesuai Harga Tiket | 100.000,- |
| 15. DI. Jogjakarta | Sesuai Harga Tiket | 282.000,- |
| 16. Bali | Sesuai Harga Tiket | 320.000,- |
| 17. Nusa Tenggara Barat | Sesuai Harga Tiket | 436.000,- |
| 18. Nusa Tenggara Timur | Sesuai Harga Tiket | 162.000,- |
| 19. Kalimantan Barat | Sesuai Harga Tiket | 290.000,- |
| 20. Kalimantan Tengah | Sesuai Harga Tiket | 188.000,- |
| 21. Kalimantan Selatan | Sesuai Harga Tiket | 282.000,- |
| 22. Kalimantan Timur | Sesuai Harga Tiket | 802.000,- |
| 23. Kalimantan Utara | Sesuai Harga Tiket | 706.000,- |
| 24. Sulawesi Utara | Sesuai Harga Tiket | 620.000,- |
| 25. Gorontalo | Sesuai Harga Tiket | 268.000,- |
| 26. Sulawesi Barat | Sesuai Harga Tiket | 434.000,- |
| 27. Sulawesi Selatan | Sesuai Harga Tiket | 256.000,- |
| 28. Sulawesi Tengah | Sesuai Harga Tiket | 302.000,- |
| 29. Sulawesi Tenggara | Sesuai Harga Tiket | 664.000,- |
| 30. Maluku | Sesuai Harga Tiket | 680.000,- |
| 31. Maluku Utara | Sesuai Harga Tiket | 806.000,- |
| 32. Papua | Sesuai Harga Tiket | 708.000,- |
| 33. Papua Barat | Sesuai Harga Tiket | 260.000,- |

Penjelasan :

- Transport PP sesuai jarak yang dimaksud adalah yang menggunakan kendaraan Dinas / kendaraan pribadi, biaya transport diperhitungkan dengan kebutuhan BBM sesuai jarak sebagaimana tabel dan dibuktikan dengan nota pembelian BBM;
- Untuk transport dengan menggunakan kendaraan umum besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku. Apabila bukti - bukti pengeluaran yang bisa menunjukkan besarnya tarif tidak diperoleh, maka untuk bukti SPJ dilengkapi dengan surat pernyataan pengeluaran riil (sebagaimana *format angka 34.6*).
- Alokasi biaya transport di tempat tujuan yang diperhitungkan adalah sebagaimana contoh berikut :
Seorang Pejabat / PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Pasuruan ke Jakarta, maka alokasi biaya transportnya :
 - *Berangkat*, biaya transport dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan di Jakarta (*hotel/penginapan/kantor*);
 - *Kembali*, biaya transport dari tempat tujuan di Jakarta (*hotel/penginapan/kantor*) ke Bandara Soekarno-Hatta.

34.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

a. Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

| No | Kab./Kota Tujuan | Sat | Walikota/Wkl. Walikota, Ketua/Wkl. Ketua DPRD | Anggota DPRD/Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/Gol.IV | Pejabat Eselon IV/Gol.III | Gol.II/I/N on PNS |
|-------------|------------------|-----|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Kabupaten : | | | | | | | |
| 1 | Bangkalan | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 200.000,- |
| 2 | Banyuwangi | OH | 950.000,- | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 3 | Blitar | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 4 | Bojonegoro | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Bondowoso | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 6 | Gresik | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 7 | Jember | OH | 950.000,- | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 8 | Jombang | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 9 | Kediri | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 10 | Lamongan | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 11 | Lumajang | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 12 | Madiun | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 13 | Magetan | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 14 | Malang | OH | 950.000,- | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 15 | Mojokerto | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 16 | Nganjuk | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 17 | Ngawi | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 18 | Pacitan | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 19 | Pamekasan | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 20 | Pasuruan | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 21 | Ponorogo | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 22 | Probolinggo | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 23 | Sampang | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 24 | Sidoarjo | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 25 | Situbondo | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 26 | Sumenep | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 27 | Trenggalek | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 28 | Tuban | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 29 | Tulung-agung | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| Kota : | | | | | | | |
| 30 | Batu | OH | 950.000,- | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 31 | Blitar | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 32 | Kediri | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 33 | Madiun | OH | 850.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 34 | Malang | OH | 950.000,- | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- |
| 35 | Mojokerto | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 36 | Probolinggo | OH | 750.000,- | 550.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 37 | Surabaya | OH | 1.000.000,- | 800.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 300.000,- |

b. Luar Propinsi Jawa Timur :

(dalam rupiah)

| No | Propinsi Tujuan | Sat | Walikota/ Wkl.Walikota, Ketua/ Wkl.Ketua DPRD | Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/Gol.IV | Pejabat Eselon IV/Gol.III | Gol.II/I/ Non PNS |
|----|------------------|-----|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Aceh | OH | 4.420.000 | 1.308.000 | 1.080.000 | 410.000 | 370.000 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | 4.960.000 | 1.214.000 | 703.000 | 505.000 | 310.000 |
| 3 | Riau | OH | 3.817.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450.000 | 380.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | 4.275.000 | 1.285.000 | 650.000 | 502.000 | 280.000 |
| 5 | Jambi | OH | 4.000.000 | 1.176.000 | 697.000 | 382.000 | 290.000 |
| 6 | Sumatera Barat | OH | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 477.000 | 370.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | OH | 4.680.000 | 1.228.000 | 605.000 | 514.000 | 310.000 |
| 8 | Lampung | OH | 3.960.000 | 1.299.000 | 790.000 | 374.000 | 356.000 |
| 9 | Bengkulu | OH | 1.300.000 | 790.000 | 712.000 | 599.000 | 510.000 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | 3.335.000 | 1.310.000 | 850.000 | 533.000 | 304.000 |
| 11 | Banten | OH | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 797.000 | 400.000 |
| 12 | Jawa Barat | OH | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 463.000 |
| 13 | DKI Jakarta | OH | 8.720.000 | 1.086.000 | 800.000 | 610.000 | 400.000 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 350.000 |
| 15 | DI. Yogyakarta | OH | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 461.000 |
| 16 | Bali | OH | 4.881.000 | 1.810.000 | 1.304.000 | 904.000 | 658.000 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 17 | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.429.000 | 2.738.000 | 737.000 | 540.000 | 360.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662.000 | 400.000 |
| 19 | Kalimantan Barat | OH | 2.400.000 | 1.130.000 | 866.000 | 430.000 | 361.000 |
| 20 | Kalimantan Tengah | OH | 3.000.000 | 1.596.000 | 923.000 | 558.000 | 436.000 |
| 21 | Kalimantan Selatan | OH | 4.250.000 | 1.679.000 | 816.000 | 500.000 | 379.000 |
| 22 | Kalimantan Timur | OH | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| 23 | Kalimantan Utara | OH | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| 24 | Sulawesi Utara | OH | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549.000 | 342.000 |
| 25 | Sulawesi Selatan | OH | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539.000 | 378.000 |
| 26 | Sulawesi Tengah | OH | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493.000 | 389.000 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | OH | 1.850.000 | 1.070.000 | 802.000 | 488.000 | 420.000 |
| 28 | Sulawesi Utara | OH | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549.000 | 342.000 |
| 29 | Gorontalo | OH | 1.320.000 | 1.134.000 | 910.000 | 423.000 | 240.000 |
| 30 | Maluku | OH | 3.000.000 | 1.030.000 | 680.000 | 545.000 | 414.000 |
| 31 | Maluku Utara | OH | 3.110.000 | 1.512.000 | 600.000 | 478.000 | 380.000 |
| 32 | Papua | OH | 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 | 460.000 | 414.000 |
| 33 | Papua Barat | OH | 2.750.000 | 1.482.000 | 976.000 | 798.000 | 370.000 |

34.4. Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri untuk komponen uang harian, transport dan penginapan diatur sebagai berikut :

(dalam rupiah)

| Pelaksana Perjalanan Dinas | Transport PP | Penginapan | Uang Harian |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|
| - Walikota/Ketua DPRD | At cost | At cost | 2.000.000,- |
| - Wakil Walikota/Wkl. Ketua DPRD | At cost | At cost | 1.750.000,- |
| - Anggota DPRD | At cost | At cost | 1.350.000,- |
| - Pejabat Eselon II/a | At cost | At cost | 1.350.000,- |
| - Pejabat Eselon II/b | At cost | At cost | 1.150.000,- |
| - Pejabat Eselon III/a | At cost | At cost | 1.000.000,- |
| - Pejabat Eselon III/b | At cost | At cost | 1.000.000,- |
| - Pejabat Eselon IV/a | At cost | At cost | 800.000,- |
| - Pejabat Eselon IV/b | At cost | At cost | 800.000,- |
| - PNS Gol. IV | At cost | At cost | 800.000,- |
| - PNS Gol. III | At cost | At cost | 750.000,- |
| - PNS Gol. II | At cost | At cost | 650.000,- |
| - PNS Gol. I | At cost | At cost | 500.000,- |

34.5. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama :

Biaya uang saku pemeriksa merupakan biaya kompensasi yang diberikan kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

(dalam rupiah)

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----|
| Aparat Fungsional Pemeriksa (auditor) | 100.000,- | /OH |
|---------------------------------------|-----------|-----|

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

34.6. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|--------|--------|
| | | |
| | Jumlah | |

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui;
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran,

Pasuruan,
2015
Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

34.7. Daftar tarif jarak batas atas angkutan penumpang antar kota dalam propinsi Jawa Timur (mobil Bus umum) kelas ekonomi dari kota Pasuruan ke terminal tujuan

| No. | Terminal Tujuan | Besar Tarif (Rp.) |
|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | Bangkalan | 17.100,- |
| 2 | Banyuwangi | 43.700,- |
| 3 | Blitar | 28.400,- |
| 4 | Bojonegoro | 32.800,- |
| 5 | Bondowoso | 31.700,- |
| 6 | Gresik | 16.100,- |
| 7 | Jember | 22.900,- |
| 8 | Jombang | 22.300,- |
| 9 | Kediri | 32.100,- |
| 10 | Lamongan | 21.300,- |
| 11 | Lumajang | 14.700,- |
| 12 | Madiun | 38.500,- |
| 13 | Magetan | 43.700,- |
| 14 | Malang | 10.700,- |
| 15 | Mojokerto | 17.100,- |
| 16 | Nganjuk | 30.300,- |
| 17 | Ngawi | 45.100,- |
| 18 | Pacitan | 58.800,- |
| 19 | Pamekasan | 33.600,- |
| 20 | Ponorogo | 43.700,- |
| 21 | Probolinggo | 6.300,- |
| 22 | Sampang | 28.600,- |
| 23 | Sidoarjo | 9.800,- |
| 24 | Situbondo | 25.500,- |
| 25 | Sumenep | 43.600,- |
| 26 | Trenggalek | 41.300,- |
| 27 | Tuban | 31.600,- |
| 28 | Tulungagung | 35.600,- |
| 29 | Batu | 14.800,- |
| 30 | Surabaya | 9.800,- |

Catatan :

- Bagi Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD / Sekda yang dalam undangan mengikutsertakan istri, maka biaya transport dan uang harian bagi istri mengikuti standart pejabat yang bersangkutan.
- Biaya Penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya;
- Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, workshop, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang ada, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut;
- Dalam hal petugas yang melaksanakan perjalanan dinas (SPD) tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar propinsi dan dalam propinsi;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lump sum.
- Fasilitas transport bagi pelaksana perjalanan dinas diklasifikasikan sebagai berikut :

| No. | Pelaksana Perjalanan Dinas | Moda Transportasi | | | |
|-----|---|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta api/Bus | Lainnya |
| 1. | Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, anggota komisi | Bisnis | VIP/kelas I A | Spesial/ Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 2 | Pejabat eselon II dan pejabat lain yang setara | Ekonomi | Kelas IB | Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 3 | Pejabat eselon III, eselon IV, PNS golongan IV, III, II dan I | Ekonomi | Kelas IIA | Eksekutif | Sesuai kenyataan |

- Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.
- Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Walikota, Wakil Walikota / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak lain tersebut dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Adapun penyetaraan / penggolongan terhadap pihak lain ditentukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

2. Ketentuan Bab V huruf B angka 3 dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 diubah, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut :

3. Standar Biaya Akomodasi Kegiatan Diklat, Kursus, Seminar, Workshop, Bintek, Loka Karya dan kegiatan lain sejenis :

(dalam rupiah)

| | | |
|---|-------------|-------|
| 1. Hotel Berbintang | 400.000,- | /OH |
| 2. Hotel Melati | 300.000,- | /OH |
| 3. Balai Diklat dan tempat lain yang sejenis milik Pemerintah/ BUMN/ BUMD | 350.000,- | /OH |
| 4. Hotel tanpa menginap (half day) : | | |
| - Untuk kapasitas ≤ 100 orang | 180.000,- | /OH |
| - Untuk kapasitas > 100 orang | 200.000,- | /OH |
| 5. Hotel tanpa menginap (full day) : | | |
| - Untuk kapasitas ≤ 100 orang | 200.000,- | /OH |
| - Untuk kapasitas > 100 orang | 230.000,- | /OH |
| 6. Sewa tempat/gedung pertemuan milik Pemerintah/ BUMN/ BUMD | 1.500.000,- | /hari |

- Biaya akomodasi point 1 s/d 3 sudah termasuk tempat/gedung pertemuan, penginapan, makan 3 (tiga) kali dan snack 2 (dua) kali dalam sehari.
- Biaya akomodasi point 4 sudah termasuk tempat/gedung pertemuan, makan 1 (satu) kali dan snack 1(satu) kali dalam sehari.
- Biaya akomodasi point 5 sudah termasuk tempat/gedung pertemuan, makan 2(dua) kali dan snack 2(dua) kali dalam sehari.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

SALINAN

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008